

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN WISATA BUKIT PUNJABU DI DESA BUNTU BUANGIN, KECAMATAN PITU RIASE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Darta Wijaya^{1*}, Muhammad Ikbal², & Ahmad Mannu³

^{*1,2&3} Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

*Koresponden e-mail: dartawijaya614@gmail.com

Submit Tgl: 15-Juni-2026

Diterima Tgl: 17-Juni-2026

Diterbitkan Tgl: 1-Oktober-2026

Abstract: *This study aims to determine community participation in the development of Punjabu Hill tourism in Buntu Buangin Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency. The research employed a quantitative descriptive type with a single variable. The population consisted of 245 heads of households in Buntu Buangin Village, and the sample was determined using the Slovin formula at a 5% margin of error, resulting in 71 respondents selected through simple random sampling. Data were collected through observation, questionnaires, and literature review, while data analysis used validity and reliability tests with the assistance of SPSS version 21.0 and a Likert scale interpretation. The results show that the community participation indicator according to Pretty obtained an average of 59%, the community participation indicator in tourism development according to Timothy obtained 58%, and the inhibiting-factor indicator according to Plummer obtained 59%. All three indicators fall into the "quite good" category, indicating that community participation has been established but is not yet optimal, particularly in strategic decision-making and long-term involvement.*

Keywords: *community participation; tourism; tourism village; Punjabu Hill.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Wisata Bukit Punjabu di Desa Buntu Buangin, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian menggunakan tipe deskriptif kuantitatif dengan satu variabel. Populasi penelitian adalah kepala keluarga di Desa Buntu Buangin sebanyak 245 kepala keluarga, dan sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin pada taraf kesalahan 5% sehingga diperoleh 71 responden yang diambil melalui teknik *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas dengan bantuan SPSS versi 21.0 serta interpretasi skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator partisipasi masyarakat menurut Pretty memperoleh rata-rata 59%, indikator partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata menurut Timothy memperoleh rata-rata 58%, dan indikator faktor penghambat partisipasi menurut Plummer memperoleh rata-rata 59%. Ketiga indikator tersebut berada pada kategori "cukup baik", yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah terbangun namun belum optimal, terutama pada aspek pengambilan keputusan strategis dan keterlibatan jangka panjang.

Kata kunci: partisipasi masyarakat; pariwisata; desa wisata; Bukit Punjabu.



Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>

Cara mengutip Wijaya, D., Ikbal, M., & Mannu, A. (2026). Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Wisata Bukit Punjabu di Desa Buntu Buangin, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. *Pahlawan Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya*, 22(2), 239–246. <https://doi.org/10.57216/pah.v22i2.86>

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pariwisata telah menjadi prioritas strategis bagi banyak daerah di Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat identitas budaya. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pariwisata tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Pendekatan pembangunan pariwisata yang efektif saat ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat lokal sebagai subjek, bukan sekadar objek, dalam keseluruhan proses pembangunan (Timothy, 1999).

Pergeseran peran tersebut sejalan dengan konsep *community based tourism* (pariwisata berbasis masyarakat) yang menegaskan bahwa keberlanjutan destinasi hanya dapat dicapai apabila masyarakat lokal berperan aktif dalam pengelolaan, memiliki rasa kepemilikan (*sense of ownership*), serta memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan budaya secara langsung (Tosun, 2006). Tanpa keterlibatan masyarakat, pembangunan pariwisata cenderung bersifat *top-down* dan berisiko menimbulkan ketidakselarasan antara program dengan kebutuhan lokal, lemahnya dukungan masyarakat, hingga konflik kepentingan antara pengelola dan warga (Tosun, 2006).

Sejalan dengan kebijakan nasional mengenai pengembangan desa wisata, banyak daerah mulai menginisiasi pembangunan berbasis komunitas dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya lokal sebagai aset utama. Salah satu contoh yang menonjol adalah pengembangan Bukit Punjabu di Desa Buntu Buangin, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukit Punjabu dikenal dengan keindahan panorama perbukitan, hamparan kebun cengkeh, dan beragam spot wisata alam. Sejak dikelola secara kolaboratif oleh pemerintah desa bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan masyarakat, destinasi ini berkembang pesat dan menjadi ikon wisata daerah.

Keberhasilan tersebut memperoleh pengakuan tingkat nasional, antara lain Juara II Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara (LPDWN) Tahun 2022 dari Kementerian Desa PDTT, serta masuk dalam 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi tidak hanya berbasis kekayaan alam, tetapi juga keterlibatan sosial dan kelembagaan yang cukup kuat. Namun, pencapaian formal tersebut belum serta-merta menggambarkan partisipasi masyarakat secara utuh, sebab pembangunan pariwisata desa sering kali masih bersifat *top-down*, di mana peran masyarakat hanya terbatas pada kegiatan teknis seperti gotong royong dan pemeliharaan kebersihan tanpa keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis.

Keterbatasan partisipasi substantif ini berpotensi menimbulkan beberapa masalah. Pertama, masyarakat dapat merasa terpinggirkan sehingga motivasi dan kepedulian terhadap kelestarian wisata berkurang. Kedua, dominasi pengambilan keputusan oleh elit tertentu berisiko menyebabkan manfaat ekonomi tidak merata dan menimbulkan ketimpangan sosial. Ketiga, tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi, pengembangan pariwisata rawan tidak sesuai kebutuhan lokal dan sulit bertahan dalam jangka panjang (Aminah & Prasetyo, 2018).

Secara teoretis, partisipasi publik merupakan inti dari tata kelola yang demokratis dan kolaboratif. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata mencakup berbagai dimensi, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan hasil, hingga pengawasan dan evaluasi program (Timothy,

1999). Partisipasi yang aktif dan bermakna akan menciptakan rasa memiliki, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan keberlanjutan destinasi wisata. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat di Desa Buntu Buangin mengalami dinamika yang kompleks: di satu sisi masyarakat antusias menjaga kebersihan lokasi dan membangun fasilitas secara gotong royong, namun di sisi lain masih terdapat kendala berupa kurangnya pelatihan dan pendampingan, keterbatasan kapasitas manajerial, minimnya akses informasi kebijakan desa, serta dominasi pengambilan keputusan oleh pihak tertentu.

Pembangunan desa wisata juga berpijak pada kerangka hukum nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit menegaskan kewenangan desa dalam mengelola potensi lokal, termasuk pariwisata, dengan mewajibkan pelibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan. Demikian pula Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab. Pada tataran perencanaan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024 menempatkan pengembangan desa wisata sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, sedangkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) menjadikan desa wisata sebagai indikator penting dalam dimensi ketahanan ekonomi desa. Landasan normatif ini menegaskan bahwa pelibatan masyarakat bukan sekadar kebutuhan praktis, melainkan amanat hukum yang wajib dilaksanakan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu serupa. Amandawati, Sutawa, dan Efendi (2023) menemukan bahwa partisipasi masyarakat lokal menjadi faktor kunci keberhasilan pengembangan desa wisata di Hidden Canyon, Bali. Aminah dan Prasetyo (2018) menegaskan bahwa partisipasi yang bermakna memerlukan ruang keterlibatan sejak tahap perencanaan, sementara Fithria dan Agustiar (2015) serta Deswati dan Triyanti (2016) menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Kajian-kajian tersebut umumnya menyoroti pentingnya partisipasi, namun belum banyak yang mengukur tingkat partisipasi secara kuantitatif pada destinasi berbasis perbukitan di wilayah Sulawesi Selatan. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yakni mengukur tingkat partisipasi masyarakat Desa Buntu Buangin secara kuantitatif dengan memadukan tiga kerangka teori sekaligus.

Fenomena minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Wisata Bukit Punjabu tidak sejalan dengan teori partisipasi yang dikemukakan Pretty (1995), yang mengklasifikasikan partisipasi ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari partisipasi pasif hingga inisiatif mandiri (*self-mobilization*). Partisipasi yang ideal adalah partisipasi interaktif, ketika masyarakat tidak hanya hadir secara fisik tetapi juga aktif berkontribusi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi hasil. Kondisi di lapangan justru mencerminkan tingkat partisipasi yang cenderung mendekati kategori *passive participation* (Leeuwis, 2000), yaitu masyarakat hanya menerima sosialisasi dan undangan dari aparat desa tanpa merasa berkewajiban untuk terlibat. Akibatnya, ketika ada kegiatan di kawasan wisata, sebagian besar warga memilih fokus pada urusan pribadi dibandingkan ikut serta dalam kegiatan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Wisata Bukit Punjabu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambatnya. Hasil penelitian diharapkan dapat

menjadi dasar bagi perumusan strategi peningkatan partisipasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif dengan satu variabel. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang memberi makna melalui penafsiran angka statistik, bukan makna kebahasaan atau kulturalnya, dengan dasar penelitian berupa survei yang menjadikan kuesioner sebagai instrumen utama pengumpulan data di lapangan (Sugiyono, 2019).

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga di Desa Buntu Buangin sebanyak 245 kepala keluarga. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin pada taraf kesalahan 5% sehingga diperoleh 71 responden, yang diambil melalui teknik *simple random sampling*, yaitu setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel (Sugiyono, 2019). Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan Wisata Bukit Punjabu masih tergolong kurang. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yakni 13 April 2026 sampai 13 Juni 2026.

Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga cara. Pertama, observasi, yaitu teknik pengamatan untuk mengevaluasi aspek kognitif dan nonkognitif responden, termasuk kinerja, minat, dan sikap terhadap situasi yang diteliti. Kedua, kuesioner, yaitu pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan yang dibagikan langsung kepada responden sesuai objek penelitian. Ketiga, studi kepustakaan, yaitu penelaahan buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan partisipasi masyarakat dan pariwisata sebagai acuan referensi.

Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 21.0 untuk menguji kualitas data melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan mengorelasikan skor setiap item terhadap skor total; suatu item dinyatakan valid apabila $r\text{-hitung} \geq r\text{-tabel}$ pada uji dua sisi dengan signifikansi 0,05 (Sugiyono, 2019). Selanjutnya, data hasil kuesioner diinterpretasikan menggunakan skala Likert dengan kriteria persentase, yaitu 0–20% sangat kurang, 21–40% kurang, 41–60% cukup baik, 61–80% baik, dan 81–100% sangat baik (Riduwan, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, hasil olah data kuesioner disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Indikator Partisipasi Masyarakat (Pretty)

Indikator	Deskripsi	%
Kesadaran	Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian serta potensi ekonomi Bukit Punjabu	60%
Evaluasi	Keterlibatan masyarakat dalam memberikan saran dan kritik terhadap pengelolaan objek wisata Bukit Punjabu yang telah berjalan	58%
Keterlibatan jangka panjang	Komitmen masyarakat untuk tetap terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan Wisata Bukit Punjabu secara berkelanjutan	58%
Rata-rata persentase (176/3)		59%

Sumber: Rekapitulasi Kuesioner, Mei 2026

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata persentase indikator partisipasi masyarakat menurut Pretty adalah 59% sehingga berada pada kategori “cukup baik”. Aspek kesadaran memperoleh persentase tertinggi sebesar 60%, sedangkan aspek evaluasi dan keterlibatan jangka panjang memperoleh persentase yang sama, yaitu 58%.

Tabel 2. Rekapitulasi Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata (Timothy)

Indikator	%
Keterlibatan dalam perencanaan — tingkat keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah pengembangan Wisata Bukit Punjabu	58%
Keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur — kontribusi masyarakat berupa tenaga (gotong royong), lahan, atau material dalam pembangunan fasilitas fisik di area wisata	60%
Penyedia jasa wisata — inisiatif masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi dengan menyediakan layanan yang dibutuhkan wisatawan	58%
Keterlibatan dalam pengawasan dan pengelolaan — peran masyarakat dalam menjaga kelestarian, keamanan, dan keberlanjutan destinasi	58%
Jumlah	234%
Rata-rata persentase (234/4)	58%

Sumber: Rekapitulasi Kuesioner, Mei 2026

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata persentase indikator partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah 58% sehingga berada pada kategori “cukup baik”. Aspek keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur memperoleh persentase tertinggi, yaitu 60%, sementara tiga aspek lainnya berada pada angka 58%.

Tabel 3. Rekapitulasi Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat (Plummer)

Indikator	%
Pekerjaan — pengaruh alokasi waktu kerja masyarakat terhadap keterlibatan dalam pengembangan wisata	60%
Tingkat pendidikan — pengaruh jenjang pendidikan terhadap pola pikir dan daya serap informasi terkait pengembangan wisata	58%
Jenis kelamin — kesetaraan peran sosial laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan maupun pekerjaan fisik	60%
Kepercayaan pada budaya — pengaruh nilai adat, norma, atau tradisi lokal terhadap pengembangan wisata	58%
Jumlah	236%
Rata-rata persentase (236/4)	59%

Sumber: Rekapitulasi Kuesioner, Mei 2026

Berdasarkan Tabel 3, rata-rata persentase faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat adalah 59% sehingga berada pada kategori “cukup baik”. Indikator pekerjaan dan jenis kelamin memperoleh persentase tertinggi, yaitu 60%, sedikit lebih tinggi dibandingkan indikator tingkat pendidikan dan kepercayaan pada budaya yang berada pada angka 58%.

Pembahasan Hasil Penelitian

a. Indikator Partisipasi Masyarakat (Pretty)

Berdasarkan teori partisipasi masyarakat menurut Pretty (1995), partisipasi masyarakat Desa Buntu Buangin dalam pengembangan Wisata Bukit Punjabu berada pada kategori “cukup baik”. Aspek kesadaran memperoleh persentase 60%, menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami pentingnya menjaga kelestarian wisata serta manfaat ekonomi yang dapat diperoleh. Aspek evaluasi memperoleh 58%, menandakan masyarakat sudah cukup terlibat dalam memberikan saran dan kritik terhadap

pengelolaan wisata, meskipun belum optimal akibat kurangnya komunikasi dan forum diskusi antara masyarakat dan pengelola.

Aspek keterlibatan jangka panjang juga memperoleh 58% dengan kategori “cukup baik”, yang menunjukkan komitmen masyarakat dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan destinasi secara berkelanjutan karena dianggap memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Namun, keterlibatan masyarakat masih menghadapi kendala seperti kesibukan pekerjaan, kurangnya pembinaan, dan belum maksimalnya manfaat ekonomi yang dirasakan. Temuan ini sejalan dengan klasifikasi Pretty (1995), yang menempatkan partisipasi pada kategori menengah ketika masyarakat terlibat secara fungsional namun belum mencapai partisipasi interaktif atau inisiatif mandiri. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat agar partisipasi dapat meningkat secara berkelanjutan.

b. Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata (Timothy)

Berdasarkan teori partisipasi dalam pengembangan pariwisata menurut Timothy (1999), partisipasi masyarakat Desa Buntu Buangin berada pada kategori “cukup baik”. Timothy (1999) membedakan partisipasi ke dalam dua perspektif, yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan dalam memperoleh manfaat pariwisata. Aspek keterlibatan dalam perencanaan memperoleh 58%, menunjukkan bahwa masyarakat cukup terlibat dalam memberikan usulan dan pendapat terkait arah pengembangan wisata, meskipun belum merata akibat terbatasnya forum musyawarah. Aspek keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur memperoleh 60%, mencerminkan partisipasi melalui gotong royong, bantuan tenaga, dan kontribusi lain dalam pembangunan fasilitas. Aspek penyedia jasa wisata memperoleh 58%, menunjukkan masyarakat telah memanfaatkan peluang ekonomi melalui penyediaan makanan dan minuman, jasa parkir, serta usaha kecil lainnya.

Aspek keterlibatan dalam pengawasan dan pengelolaan memperoleh 58% dengan kategori “cukup baik”, yang menunjukkan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian kawasan. Namun, partisipasi belum optimal karena dipengaruhi keterbatasan ekonomi, kesibukan pekerjaan, kurangnya keterampilan, minimnya pembinaan, serta rendahnya koordinasi antara pengelola dan masyarakat. Temuan ini selaras dengan kajian Amandawati, Sutawa, dan Efendi (2023) yang menekankan bahwa keberhasilan desa wisata sangat bergantung pada intensitas keterlibatan masyarakat lokal. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan partisipasi melalui musyawarah, sosialisasi, pemberdayaan, pelatihan, dan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat.

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat (Plummer)

Berdasarkan teori Plummer (dalam Suryawan, 2004) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, terdapat empat faktor yang dikaji, yaitu pekerjaan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan kepercayaan pada budaya. Aspek pekerjaan memperoleh 60% dengan kategori “cukup baik”, menunjukkan bahwa masyarakat masih berupaya meluangkan waktu untuk terlibat meskipun memiliki pekerjaan utama sebagai petani dan pekebun. Aspek tingkat pendidikan memperoleh 58%, menandakan bahwa jenjang pendidikan memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memahami informasi dan pentingnya pengembangan wisata. Aspek jenis kelamin memperoleh 60%, menunjukkan laki-laki dan perempuan telah cukup diberikan kesempatan untuk terlibat dalam musyawarah, gotong royong, maupun kegiatan ekonomi wisata, meskipun kesetaraan peran belum sepenuhnya optimal.

Aspek kepercayaan pada budaya memperoleh 58% dengan kategori “cukup baik”. Sebagian masyarakat menilai bahwa pengembangan wisata dapat berjalan seiring pelestarian budaya lokal, namun masih terdapat kekhawatiran bahwa perkembangan pariwisata dapat membawa pengaruh negatif terhadap adat dan perilaku sosial. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menjadi penghambat dalam meningkatkan partisipasi, sehingga diperlukan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, pelibatan tokoh adat, peningkatan pendidikan dan keterampilan, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat agar partisipasi dalam pengembangan Wisata Bukit Punjabu dapat meningkat secara berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Bukit Punjabu berada pada kategori “cukup baik” dengan rata-rata sekitar 59%. Masyarakat telah terlibat dalam kegiatan gotong royong, pemberian ide, serta pengembangan kegiatan ekonomi wisata, meskipun keterlibatannya belum sepenuhnya optimal.
2. Masyarakat cukup berpartisipasi dalam perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan evaluasi objek wisata, namun keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis dan keterlibatan jangka panjang masih perlu ditingkatkan.
3. Faktor penghambat partisipasi masyarakat meliputi pekerjaan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan kepercayaan pada budaya. Kesibukan masyarakat sebagai petani, rendahnya pemahaman tentang pariwisata, serta kekhawatiran terhadap pengaruh wisata terhadap adat dan tradisi menjadi kendala utama, dengan rata-rata sekitar 59%.

DAFTAR RUJUKAN

Buku dan Jurnal

- Adibowo, R., & Supriyadi, R. (2021). The government strategies to increase local tax (PAD) in Purwakarta. *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*.
- Amandawati, G. A., Sutawa, G. K., & Efendi, M. N. (2023). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata di Hidden Canyon Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 21326–21335.
- Aminah, S., & Prasetyo, I. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan organisasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM). *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(1), 61–73. <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i1.17531>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>

- Deswati, R. H., & Triyanti, R. (2016). *Penguatan kapasitas masyarakat melalui pendekatan pengembangan pariwisata Desa Bahari III Kabupaten Buton Selatan*. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
- Fithria, D., & Agustiar, D. (2015). Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam konservasi wilayah pesisir di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Jaya. *Acta Aquatica*, 2, 55–59.
- Leeuwis, C. (2000). Reconceptualizing participation for sustainable rural development: Towards a negotiation approach. *Development and Change*, 31(5), 931–959. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00184>
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-E](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-E)
- Riduwan. (2015). *Skala pengukuran variabel-variabel penelitian*. Alfabeta.
- Slamet, Y. (2007). *Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi*. Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryawan, A. (2004). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan* (kutipan atas Plummer). Tesis, Universitas Diponegoro.
- Timothy, D. J. (1999). Participatory planning: A view of tourism in Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 26(2), 371–391. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(98\)00104-2](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00104-2)
- Tosun, C. (2006). Expected nature of community participation in tourism development. *Tourism Management*, 27(3), 493–504. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.12.004>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.